



**ANALISIS PERANAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
DATI II JEMBER TAHUN 1993 - 1997**

SKRIPSI

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Oleh

Agus Yudi Wianto
NIM : 9408101123/SP

Asal	: Hadiah	Klass 336-2 WIA a
Terima Tgl:	05 JUL 1999	
No, Induk :	PTI'99 - 7. 614	

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
1999**



JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PERANAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN DATI II JEMBER
TAHUN 1993 - 1997

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : AGUS YUDI WIANTO

N. I. M. : 9408101123

J u r u s a n : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

1 Juni 1999

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

S. houw
Drs. S O E Y O N O
NIP. 131 386 653



Sekretaris,

[Signature]
Drs. BADJURI, ME

NIP. 131 386 652

Anggota,

[Signature]
Dra. A M I N A H

NIP. 130 676 291

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

[Signature]
Drs. H. S U K U S N I, M. Sc

NIP. 130 350 764



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SARJANA EKONOMI

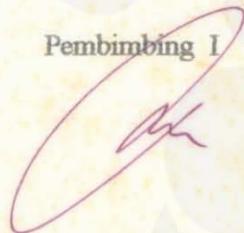
Disusun oleh : Agus Yudi Wianto
Nomor Induk Mahasiswa : 9408101123
Program Studi : S - 1
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Konsentrasi mata kuliah yang
menjadi dasar penyusunan skripsi : Ekonomi Publik
Dosen Pembimbing : 1. Dra. Aminah
2. Dra. Riniati, MP.

Disahkan di : Jember

Pada tanggal : April 1999

Disetujui dan diterima baik oleh:

Pembimbing I



Dra. Aminah

NIP. 130676291

Pembimbing II



Dra. Riniati, MP.

NIP. 131624477

MOTTO:

“.....Katakanlah: Apakah sama orang yang mempunyai pengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? sesungguhnya yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang mempunyai fikiran.”

(QS : Az-zumar 9)

“ Mengetahui ketidakmampuan untuk bisa memahami apa yang harus dipahami adalah sama dengan sudah memahami.”

(Al-Hadits)

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Ibunda dan ayahanda tercinta,
Almamater kebanggaan,
Saudara-saudaraku tersayang,
serta sahabat-sahabatku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PERANAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER TAHUN 1993/1994 - 1997/1998” disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak baik materiil maupun spirituil, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya pada :

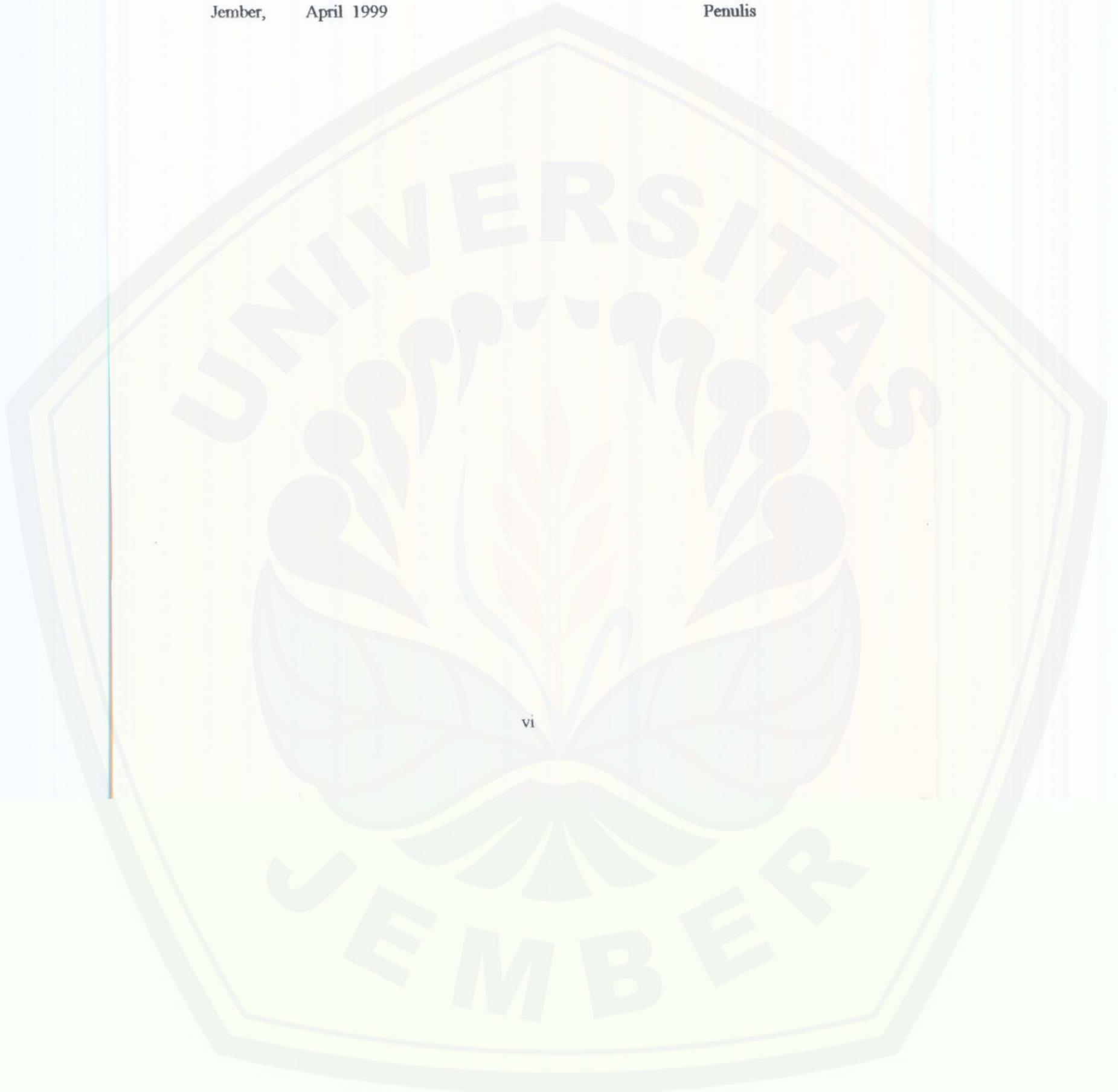
1. Dra. Aminah dan Dra. Riniati, MP selaku dosen pembimbing atas koreksi dan masukannya sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna,
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta segenap pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi,
3. Kepala Kantor Statistik Daerah Tingkat II Jember dan segenap staf atas bantuannya dalam pengumpulan data,
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember atas ijin dalam penelitian,
5. Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dan semua karyawan atas segala bantuannya,
6. Ibunda dan Ayahanda tercinta atas pengorbanannya yang telah diberikan selama ini untukku,
7. Saudara-saudaraku yang telah memberi perhatian dan warna dalam kehidupanku: Mas Anang, Mbak Efi, Dik Reni dan Dik Aris,
8. Sahabatku di Bengawan Solo 08 : Mas Erwin, Mas Mul, Deni, Yoyok, Edi, Teguh, Anang dan Agus atas bantuan, motivasi dan dinamika kehidupannya,

9. Semua rekan-rekan SP yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas persahabatan yang selama ini terjalin.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan pembaca semuanya.

Jember, April 1999

Penulis



DAFTAR ISI

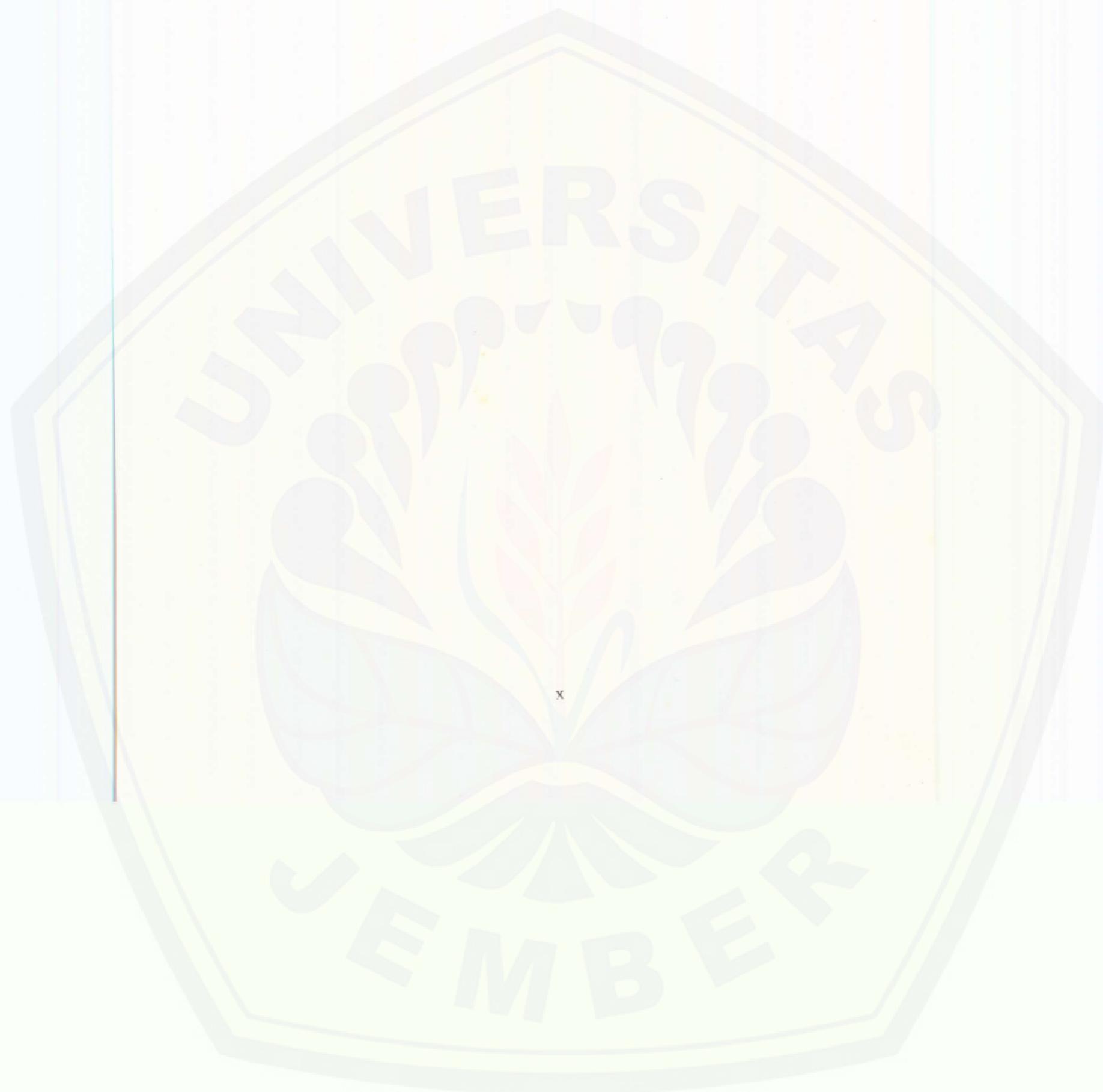
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Definisi Operasional.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER	
2.1 Penduduk dan Tenaga Kerja.....	11
2.2 Sosial Budaya.....	12
2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.....	13
2.4 Kontribusi Sektor Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto.....	17
2.5 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.....	19
2.6 Pertumbuhan Pasar.....	19
BAB III LANDASAN TEORI	
3.1 Pembangunan Daerah.....	21

3.2 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.....	22
3.3 Sumber-sumber Penerimaan Daerah.....	25
3.4 Kriteria Penerimaan Retribusi Daerah Sebagai Sumber PAD.....	26
3.5 Retribusi Sebagai Pajak yang Bersifat Khusus.....	27
3.6 Dasar Hukum Retribusi Pasar.....	29
3.7 Subyek dan Obyek Retribusi Pasar.....	30
3.8 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar.....	32
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Penerimaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.....	34
4.2 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.....	35
4.3 Elastisitas Retribusi Pasar.....	37
4.4 Efektifitas Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.....	40
4.5 Efisiensi Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.....	41
4.6 Pembahasan.....	43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	48
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

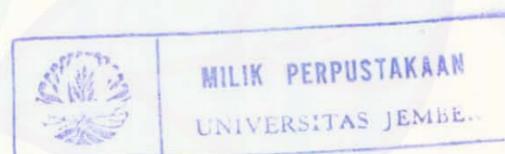
No.	Judul	Hal
1	Jumlah dan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1990 - 1997.....	11
2	Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1997/1998.....	13
3	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1993-1997.....	14
4	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1994-1997.....	16
5	Kontribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1995-1997.....	18
6	Kontribusi Rata-rata Komponen PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	19
7	Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	34
8	Perkembangan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	36
9	Perkembangan Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	37
10	Elastisitas Retribusi Pasar Terhadap PDRB di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	38
11	Elastisitas retribusi Pasar Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	39

12	Elastisitas retribusi Pasar Terhadap Inflasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	40
13	Efektifitas Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	41
14	Efisiensi Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
1	Kontribusi Rata-rata Komponen PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	52
2	Perhitungan Elastisitas Retribusi Pasar terhadap PDRB di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	53
3	Perhitungan Elastisitas Retribusi Pasar terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	54
4	Perhitungan Elastisitas retribusi Pasar terhadap Inflasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	55
5	Perhitungan Efektifitas Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	56
6	Perhitungan Efisiensi Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	57
7	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	58
8	Jumlah Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Menurut Klasifikasinya Pada Tahun 1997.....	59
9	Tarif Retribusi Pasar yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Jember.....	60
10	Pertumbuhan Jumlah Pasar dan Pemakai Jasa di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998.....	61



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju perkembangan antar daerah, antar dan antara kota dan desa, antar dan antara sektor dan daerah, serta percepatan pengembangan Kawasan Timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah bersangkutan sebagai perwujudan wawasan nusantara (Dikti, 1998:133).

Sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional, peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan harus mendapat perhatian yang cukup besar agar pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan pembangunan nasional. Sistem pemerintah daerah yang dijalankan di Indonesia sekarang ini diatur oleh Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Masalah penerimaan daerah merupakan persoalan yang cukup kompleks, karena kemampuan menghasilkan penerimaan sendiri terkait dengan otonomi daerah bersangkutan dan kemampuan melakukan pembangunan sosial ekonomi. Persoalannya kemudian bermuara pada dua faktor penting, yaitu : pertama, pemerintah daerah yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggali penerimaan untuk pembangunannya sendiri, sehingga sulit untuk mengembangkan potensi daerah dan potensi kreatifitas birokrasi di daerah. Birokrasi daerah akhirnya hanya menjadi instrumen pusat, yang lambat perkembangan kapasitas dan kreatifitasnya. Kedua, kemampuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dan kemampuan pembangunan wilayah sendiri sangat tergantung pada birokrasi daerah sendiri tetapi tetap dipengaruhi oleh konsentrasi pembangunan yang terjadi secara nasional (Rachbini, 1996 :1).

Dominasi subsidi pemerintah pusat sangat dominan, tidak sedikit daerah yang hampir mutlak sangat tergantung kepada subsidi pemerintah pusat, dengan kata lain hanya sekitar 10% sampai 20% dari total penerimaannya dapat diciptakan sendiri oleh daerah. Itu berarti antara 90% sampai 80% dari penerimaan tahunannya harus disubsidi oleh pemerintah pusat. Secara hipotesis, jika subsidi ini turun atau bahkan macet, maka penerimaan daerah bersangkutan pun akan mengalami penurunan kemacetan (Rachbini,1996:5).

• Untuk meningkatkan penerimaan dan kemandirian daerah, maka setiap daerah dituntut untuk mampu membiayai pembangunan daerahnya masing-masing dengan dana yang berasal dari sumber keuangan sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap atau masing-masing pemerintah daerah diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).

Dalam program pengembangan daerah wisata yang menitikberatkan pada wilayah Surabaya-Malang area dan Banyuwangi area, dimana Kabupaten Jember termasuk di dalamnya terbuka peluang untuk pengembangan potensi daerah yang dimiliki dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. Sebagai daerah otonom yang juga merupakan daerah yang berkembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember merupakan daerah yang potensial untuk peningkatan PAD.

Dalam usaha menggali potensi dari berbagai struktur dan variasi retribusi daerah pemerintah telah membuat dan menetapkan undang-undang perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memperbaiki undang-undang perpajakan yang lama dengan menyederhanakan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah serta menghapus jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang tidak berpotensi.

Kondisi keuangan daerah Pemda Tingkat II Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah otonom, situasinya tidak jauh berbeda dari daerah di sekitarnya; Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo. APBD Pemda Tingkat II Kabupaten Jember pada tahun anggaran 1992/1993 sebesar Rp.40.465.927.000,- dan pada tahun

anggaran 1996/1997 sebesar Rp.129.333.371.000,- selama kurun waktu itu telah meningkat sebesar 219,61% (Kantor Statistik, 1997:25).

Jumlah penerimaan daerah masih didominasi oleh bagian sumbangan dan bantuan dari daerah tingkat I (Dati I) dan pemerintah pusat yaitu hampir 70% dari penerimaan daerah. Pada tahun anggaran 1992/1993 sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 sumbangan dan bantuan dari daerah tingkat I dan pemerintah pusat mengalami peningkatan sebesar 57,48%. Keadaan ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagai perbandingan, PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tahun anggaran 1993/1994-1996/1997 telah meningkat sebesar 129,06 %.

PAD sebagai salah satu komponen dari penerimaan daerah terdiri dari beberapa bagian, termasuk salah satunya adalah retribusi daerah. Kabupaten dan Kotamadya memiliki banyak jenis retribusi daerah. Sebagian besar pemerintah daerah hanya mampu untuk memungut 20-25 jenis saja. Jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Jember berjumlah 23 jenis (Jember dalam Angka 1997). Variasi retribusi daerah beragam jenisnya tetapi yang mempunyai potensi yang besar sangat sedikit. Retribusi daerah dipungut atas dasar peraturan pemerintah daerah (Perda) dengan persetujuan dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan dalam beberapa hal Depdagri yang menetapkan besarnya tarif sesuai pengajuan dari pemerintah daerah.

Pada tahun anggaran 1993/1994 - 1996/1997 sumbangan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember sekitar 24,54%. Sumbangan terbesar diberikan oleh retribusi daerah yang selalu mendominasi penerimaan PAD yaitu sebesar 52,59%, sedangkan perusahaan daerah 14,73%, penerimaan dinas 4,95% dan penerimaan lain-lain sebesar 3,19% pada tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan 1996/1997 (Jember dalam Angka 1997). Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sebesar 16,71%, ini menunjukkan sumbangannya terhadap PAD secara keseluruhan masih relatif rendah. Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi

daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan dan memiliki arti penting dalam pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan aspek pembiayaan.

Untuk memperkecil ketergantungan subsidi dari pemerintah tingkat atas, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan PAD melalui komponen-komponen PAD terutama dari retribusi daerah yang memberikan sumbangan berarti bagi PAD untuk membiayai pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Retribusi pasar sebagai salah satu bagian dari retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang relatif besar bagi PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Usaha-usaha yang dilakukan Pemda setempat untuk meningkatkan retribusi daerah antara lain dengan mencari dan memperluas obyek retribusi dan membangun fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah, misalnya membangun desa pariwisata, taman rekreasi keluarga, pelelangan ikan dan lain sebagainya.

Sumber pembiayaan Pemda Tingkat II Kabupaten Jember dititikberatkan pada PAD. Peranan PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah diharapkan semakin dominan, mengingat selama ini peranannya masih belum optimal terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Sehingga, upaya peningkatan komponen PAD khususnya retribusi daerah merupakan hal penting agar ketergantungan kepada sumbangan dan bantuan pemerintah pusat dapat dikurangi.

1.2 Perumusan Masalah

Selama lima tahun anggaran yaitu tahun 1993/1994 - 1997/1998 kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember diberikan oleh retribusi daerah yakni sebesar 52,59%. Besarnya sumbangan retribusi daerah menunjukkan bahwa sumber-sumber penerimaan retribusi daerah mempunyai pengaruh bagi PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Salah satu sumber penerimaan retribusi daerah terbesar adalah berasal dari retribusi pasar.

Penerimaan dari retribusi pasar terus meningkat dari awal Pelita VI sampai sekarang menginjak Pelita VII disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah meningkatnya pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah menuntut akan

kebutuhan sarana dan prasarana yang semakin meningkat. Selain itu adanya kebijaksanaan dari pemerintah yang bersifat eksternalitas dan internalitas juga mengakibatkan penerimaan dari pos retribusi pasar terus meningkat. Dengan adanya kemajuan dalam pembangunan, tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi dan hal ini akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat lebih meningkat. Permasalahannya adalah seberapa besar sumbangan retribusi pasar terhadap PAD serta tingkat elastisitas, efektifitas, dan efisiensi dari penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember selama tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. besarnya sumbangan penerimaan retribusi pasar terhadap peningkatan PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember,
2. tingkat elastisitas retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember terhadap PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi,
3. tingkat efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember,

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan :

1. sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jember dalam menentukan dan menetapkan kebijaksanaan pembangunan, khususnya kebijaksanaan di bidang keuangan daerah dalam upaya peningkatan PAD.
2. sebagai referensi bagi peneliti yang tertarik dengan masalah keuangan daerah.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Daerah Penelitian

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 jumlah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Jember mengalami pertumbuhan sebesar 0,16 persen maka dapat diperkirakan bahwa kebutuhan akan sarana dan prasarana fisik sangat diperlukan mengingat jumlah penduduk yang meningkat tiap tahun.

Kabupaten Daerah Tingkat II Jember pada tahun 1993 terdapat 25 pasar yang dikelola PEMDA, 51 yang merupakan pasar desa dan 12 pasar hewan. Pada tahun 1997 untuk pasar PEMDA meningkat menjadi 26 dan untuk pasar desa menjadi 55 sedangkan untuk pasar hewan tidak mengalami perubahan.

Dengan semakin pesatnya pembangunan dapat menciptakan semakin banyak jenis hasil produksi dan kebutuhan masyarakat, maka aktivitas pasar akan semakin tinggi pula, pada akhirnya akan menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang peningkatan aktivitas pasar itu sendiri. Penerimaan retribusi pasar akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan yang ada di pasar. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif maka semakin banyak dan beragam jenis produk yang ditawarkan dan semakin meningkat pula jumlahnya, yang pada akhirnya hal tersebut akan semakin meningkatkan potensi pasar.

Upaya peningkatan penerimaan daerah dari komponen PAD khususnya penerimaan retribusi daerah dari retribusi pasar harus lebih dioptimalkan karena selama ini sumbangannya terhadap PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember masih relatif rendah.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder diolah secara time series, yang diperoleh dengan cara mencatat data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi terkait antara lain Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Jember, Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Jember serta studi kepustakaan. Untuk melengkapi data sekunder, digunakan juga data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pejabat yang menangani langsung permasalahan tersebut.

1.4.3 Metode Analisis Data

1. Untuk mengetahui besarnya sumbangan penerimaan retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus proporsi (Dajan A, 1982:129):

$$P_i = \frac{Y_i}{X_i} \times 100 \%$$

dimana :

P_i = nilai proporsi

Y_i = penerimaan retribusi pasar tiap tahun

X_i = Pendapatan Asli Daerah Tiap tahun

2. Untuk mengetahui tingkat kepekaan pertumbuhan retribusi pasar karena adanya laju pertumbuhan PDRB, laju pertumbuhan penduduk, dan laju pertumbuhan inflasi digunakan analisis elastisitas.

Formulasi elastisitas penerimaan retribusi pasar adalah (Davey, 1988:42) :

elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB :

$$= \frac{\% \text{ pertumbuhan retribusi pasar}}{\% \text{ pertumbuhan PDRB}}$$

elastisitas retribusi pasar terhadap jumlah penduduk :

$$= \frac{\% \text{ pertumbuhan retribusi pasar}}{\% \text{ pertumbuhan jumlah penduduk}}$$

elastisitas retribusi pasar terhadap inflasi :

$$= \frac{\% \text{ Pertumbuhan retribusi pasar}}{\% \text{ Pertumbuhan inflasi}}$$

Jika koefisien elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB lebih dari satu maka hal ini menunjukkan laju pertumbuhan retribusi pasar relatif elastis terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Demikian juga dengan koefisien elastisitas retribusi pasar terhadap jumlah penduduk lebih besar dari satu menunjukkan laju pertumbuhan retribusi pasar relatif elastis terhadap laju pertumbuhan jumlah penduduk, dan koefisien elastisitas retribusi pasar terhadap inflasi lebih besar dari satu juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan retribusi pasar relatif elastis terhadap laju pertumbuhan inflasi. Koefisien kurang dari satu menunjukkan ketidakpekaan laju pertumbuhan retribusi pasar terhadap laju pertumbuhan PDRB, laju pertumbuhan penduduk maupun laju pertumbuhan inflasi. Jika nilai koefisien elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB, jumlah penduduk, inflasi sama dengan satu, menunjukkan bahwa setiap peningkatan atau penurunan PDRB, jumlah penduduk, atau inflasi sebesar satu persen, dapat meningkatkan atau menurunkan penerimaan retribusi pasar sebesar satu persen.

3. Untuk mengukur kinerja dari administrasi pengupayaan retribusi pasar digunakan analisis efektifitas dan efisiensi. Analisis efektifitas yaitu mengukur hubungan antara hasil penerimaan retribusi pasar terhadap potensi hasil retribusi pasar, dengan asumsi semua obyek retribusi pasar membayar kewajibannya. Mengingat sulitnya mengukur besarnya potensi retribusi pasar, maka dalam penelitian ini digunakan besarnya target penerimaan retribusi pasar.

Formulasi efektifitas penerimaan retribusi pasar (Devas, 1989:143):

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan retribusi pasar}}{\text{Target penerimaan retribusi pasar}}$$

Semakin besar nilai efektifitas, berarti semakin tinggi tingkat efektifitas penerimaan retribusi pasar. Angka efektifitas yang baik adalah satu, karena berarti menunjukkan perbandingan yang seimbang antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar. Hal tersebut juga dapat berarti perencanaan dalam penerimaan retribusi pasar sudah baik, karena dalam penetapan target penerimaan retribusi pasar telah mencakup semua potensi pasar yang ada serta hambatan-hambatan yang terdapat dalam memperoleh hasil yang optimal dapat ditangani dengan baik.

Analisis efisiensi yaitu mengukur bagian dari hasil penerimaan retribusi pasar yang digunakan untuk menutup biaya atau pengeluaran dalam memperoleh penerimaan retribusi pasar tersebut. Biaya pemungutan retribusi pasar adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh Dispenda untuk merealisasikan penerimaan retribusi pasar.

Formulasi efisiensi penerimaan retribusi pasar (Devas, 1989:143):

$$= \frac{\text{Biaya Pengumpulan retribusi pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan retribusi pasar}}$$

Efisiensi akan lebih tinggi apabila biaya untuk merealisasikan penerimaan retribusi pasar ditekan serendah mungkin. Apabila koefisien nilai efisiensi sama dengan satu, maka besarnya penerimaan retribusi pasar sama dengan biaya pengumpulan retribusi pasar tersebut, dapat juga berarti tidak ada pemasukan dari jenis retribusi pasar tersebut sehingga biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan dengan realisasi penerimaannya.

1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya persepsi yang beragam dalam menginterpretasikan variabel-variabel dalam penelitian ini, maka diterangkan :

1. pertumbuhan retribusi pasar adalah jumlah penerimaan retribusi pasar pada tahun tertentu dikurangi dengan jumlah penerimaan retribusi pasar tahun sebelumnya, dibandingkan dengan jumlah penerimaan retribusi pasar tahun sebelumnya. Penerimaan retribusi pasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998.
2. pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 adalah jumlah PDRB pada tahun tertentu dikurangi dengan jumlah PDRB tahun sebelumnya, dibandingkan dengan jumlah PDRB tahun sebelumnya. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998.
3. pertumbuhan jumlah penduduk adalah jumlah penduduk pada tahun tertentu dikurangi dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya, dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya. Jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998.
4. pertumbuhan inflasi adalah tingkat inflasi yang terjadi pada tahun tertentu dikurangi dengan tingkat inflasi tahun sebelumnya, dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun sebelumnya. Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat inflasi yang terjadi pada kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998.
5. target penerimaan retribusi pasar adalah hasil yang ingin dicapai dalam penerimaan retribusi pasar pada kurun waktu tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998.
6. realisasi penerimaan retribusi pasar adalah hasil penerimaan retribusi pasar selama kurun waktu lima tahun anggaran yaitu tahun 1993/1994 - 1997/1998.
7. biaya pengumpulan retribusi pasar adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh Dispenda untuk merealisasikan penerimaan retribusi pasar.



II. GAMBARAN UMUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

2.1 Penduduk dan Tenaga Kerja

Dari hasil registrasi penduduk, pada akhir tahun 1997 penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Jember mengalami kenaikan sebesar 0,16 % dibanding akhir tahun 1996. Sejalan dengan bertambahnya penduduk maka kepadatan bertambah menjadi 822,07 jiwa/Km². Laju pertumbuhan penduduk menurut hasil sensus penduduk tahun 1990 sebesar 0,95 %. Kecamatan Sumbersari memiliki laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 3,65 % dan Kecamatan Umbulsari memiliki laju pertumbuhan terendah yaitu 0,25 % (PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Jember 1997).

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1990 - 1997

No.	Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)
1.	1990	1.010.089	1.052.200	2.062.289	0,95
2.	1991	1.019.676	1.062.187	2.081.863	0,95
3.	1992	1.029.401	1.072.317	2.101.718	0,96
4.	1993	1.039.266	1.082.593	2.121.859	0,96
5.	1994	1.049.275	1.093.019	2.142.294	0,96
6.	1995	1.059.430	1.103.598	2.163.028	0,97
7.	1996	1.069.736	1.114.334	2.184.070	0,97
8.	1997	1.080.142	1.125.174	2.205.316	

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Juli 1997

Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tahun 1990 berjumlah 2.062.289 jiwa, sedangkan pada tahun 1997 berjumlah 2.205.316 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk yang terjadi pada tahun 1990 - 1997 menunjukkan pertumbuhan yang kecil dan stabil. Hal tersebut tampak pada laju pertumbuhan jumlah penduduk pada tabel 1. Pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 1990 sebesar 0,95 % dan pada tahun 1997 meningkat 0,97 %. Dengan peningkatan yang kecil (0,02 %) selama tujuh tahun, menunjukkan keberhasilan program Keluarga Berencana yang dilakukan pemerintah daerah.

Berdasarkan catatan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten daerah Tingkat II Jember jumlah pencari kerja pada tahun 1997 sebanyak 10.722 orang, yang berarti mengalami penurunan sebesar 19,77 % dari tahun lalu. Untuk lowongan pekerjaan terjadi penurunan yang diikuti juga oleh penurunan jumlah pencari kerja. Pada tahun 1996 lowongan yang tersedia sebanyak 10.888 menjadi 6.891 di tahun 1997 atau menurun 36,71 %. Dalam rangka pemecahan masalah ketenagakerjaan antara lain ditempuh kebijaksanaan pengiriman tenaga kerja keluar negeri. Banyaknya tenaga kerja yang dikirim keluar negeri tercatat 2.103 orang pada tahun 1997 atau terjadi penurunan sebesar 37,41 % dari tahun sebelumnya sebanyak 3.360 orang. Kebijakan lainnya yang ditempuh adalah dengan penyaluran, penyebaran dan penempatan tenaga kerja secara lebih merata. Untuk menunjang kebijaksanaan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Jember bersama Kantor Departemen Tenaga Kerja mengadakan program transmigrasi.

2.2 Sosial Budaya

Salah satu upaya mencerdaskan warga negara adalah dengan menyediakan sarana maupun prasarana pendidikan baik formal maupun non formal. Berhubungan dengan hal tersebut di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tersedia fasilitas pendidikan yang memadai, seperti terlihat dalam tabel 2 di bawah. Selain itu juga

terdapat 2 (dua) Perguruan Tinggi Negeri dan 12 Perguruan Tinggi Swasta yang siap mencetak sarjana setiap tahunnya.

Tabel 2. Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1997/1998

Jenis Sekolah	Sekolah		Guru		Murid	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
TK	-	487	102	1.188	-	25.261
SD	1.121	52	9.022	496	196.507	8.337
SLTP	55	72	1.728	1.131	31.209	11.640
SMU	22	53	820	1.124	12.365	14.906

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Mei 1998

Salah satu tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup sehat bagi penduduk, demi mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember pada tahun 1997 sebanyak 5 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 4 rumah sakit bersalin, 50 Puskesmas serta 19 poliklinik. Jumlah tenaga medis dan paramedis yang tersedia sebanyak 25 dokter umum, 31 dokter spesialis, 128 paramedis, 261 orang bidan, 349 perawat kesehatan, 985 dukun bayi terlatih. Sarana kesehatan lain yang tersedia adalah 24 apotik, 25 toko obat, 4 laboratorium klinik dan posyandu sebanyak 2.764 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

Keadaan perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Jember secara keseluruhan tercermin dari PDRB, yaitu jumlah atau seluruh nilai tambah produk barang dan jasa yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. Konsep yang lazim dipakai untuk menghitung pendapatan

masyarakat dan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah sampai saat ini masih dalam bentuk PDRB.

Tabel 3. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1993-1997

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Kenaikan (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1993	1.696.849,49		
1994	1.838.604,18	141.754,69	8,35
1995	1.996.764,71	158.160,53	8,60
1996	2.170.699,24	173.994,53	8,71
1997	2.269.330,52	98.636,28	4,54
Pertumbuhan rata-rata			7,53

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Oktober 1998

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Jember pada tahun 1997 ditunjukkan oleh kenaikan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 1993, sebesar 4,54 persen. Laju pertumbuhan ini lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8,71 persen dengan menggunakan tahun dasar 1993. Keberhasilan Jember mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,54 persen dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu, disebabkan kesungguhan Jember dalam melaksanakan pembangunan. Sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Jember pada tahun 1997 adalah sektor Listrik, Gas dan Air bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi regional 1997 tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektornya pada tahun 1996. Sektor pertanian yang berperan paling besar terhadap total PDRB dalam tahun 1997 ini hanya naik sebesar 1,93 %. Perkembangan sebesar ini dipengaruhi tinggi rendahnya laju pertumbuhan masing-masing sub sektornya. Sub sektor Tanaman Bahan Makanan hanya tumbuh sebesar 0,42 %, sub sektor Perkebunan hanya mencapai 1,19 %. Untuk sub sektor Peternakan mempunyai laju pertumbuhan sebesar 5,10 %, sedangkan untuk sub sektor Kehutanan dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar -20,88 % dan 15,45 %. Sektor Pertambangan dan Penggalan yang pada tahun sebelumnya tumbuh sebesar 0,90 % dalam tahun 1997 ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,38 %.

Pertumbuhan yang terjadi pada sektor Industri Pengolahan sebesar 3,69 %, sedangkan sektor Listrik, Gas dan Air bersih tumbuh sebesar 13,93 % lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 14,49 %. Sektor Bangunan mempunyai pertumbuhan 2,03 % pada tahun 1997, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,58 %.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai pertumbuhan yang relatif tinggi. Pada tahun 1997 mengalami pertumbuhan sebesar 8,93 % lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11,72 %. Besarnya pertumbuhan ini disebabkan oleh kenaikan pada masing-masing sub sektornya yaitu sub sektor Perdagangan yang pada tahun 1996 sebesar 12,72 % mengalami kenaikan hanya sebesar 9,65 % pada tahun 1997. Sub sektor Hotel mengalami pertumbuhan sebesar 5,74 % tahun 1997 dimana pada tahun sebelumnya pertumbuhannya 7,59 %. Sub sektor Restoran yang pada tahun 1996 mengalami pertumbuhan riil sebesar 5,20 % dan pada tahun 1997 hanya tumbuh sebesar 3,91 %. Secara riil sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami kenaikan sebesar 8,93 % mempunyai andil terbesar kedua setelah pertanian yaitu 20,07 % terhadap PDRB.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1994-1997 (dalam persentase)

Sektor/Sub Sektor	Pertumbuhan			
	1994	1995	1996	1997
1. Pertanian	8,41	9,63	8,42	1,93
1.1 Tanaman Pangan	6,01	9,25	9,06	0,42
1.2 Tanaman Perkebunan	7,10	8,15	8,70	1,19
1.3 Peternakan	14,28	11,47	6,24	5,10
1.4 Kehutanan	17,47	14,85	5,57	-20,88
1.5 Perikanan	17,57	16,36	14,11	15,45
2. Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,60	0,90	0,38
3. Industri Pengolahan	5,65	2,91	4,085	3,69
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	21,14	5,01	14,49	13,93
5. Bangunan	3,64	5,00	3,58	2,03
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,22	9,81	11,72	8,93
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,61	8,46	7,85	7,21
8. Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	17,56	11,60	13,90	7,37
9. Jasa-jasa	0,73	6,95	6,57	5,04
Total PDRB	8,35	8,60	8,71	4,54

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Daerah tingkat II Jember, Oktober 1998

Sektor yang mempunyai pertumbuhan positif terkecil dari sembilan sektor yang ada pada PDRB atas dasar harga konstan 1993, pada tahun 1996 adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yang hanya tumbuh sebesar 0,90 % dan 0,38 % pada tahun 1997. Dalam kelompok sektor tertier sektor jasa-jasa mengalami kenaikan pertumbuhan yang relatif rendah yaitu sebesar 6,57 % di tahun 1996 dan 5,04 % di tahun 1997. Dalam kelompok sektor tertier lainnya sektor Pengangkutan dan

Komunikasi mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 1996 sebesar 7,85 % dan tahun 1997 sebesar 7,21 %.

2.4 Kontribusi Sektor terhadap PDRB

Tiga sektor utama yang paling berpengaruh terhadap total PDRB ialah sektor Pertanian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Jasa-jasa. Peranan gabungan dari ketiga sektor ini mampu mendominasi andil sekitar 74 % terhadap total PDRB. Tingkat pertumbuhan yang terjadi pada sektor utama ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tinggi rendahnya pertumbuhan sektor utama ini mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan sektor-sektor lainnya dalam struktur PDRB. Perbedaan laju pertumbuhan antar sembilan sektor yang ada mengakibatkan berubahnya kontribusi dalam struktur perekonomian yang selanjutnya menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran sektor-sektor yang berperan di dalamnya. Pergeseran peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB atas dasar harga konstan, artinya besar kecilnya kontribusi persentase pada PDRB diulas berikut ini seperti yang terjadi khusus pergeseran pada tahun 1997.

Dalam PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 terdapat empat sektor yang makin berkurang peranannya, yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalan, sektor Industri Pengolahan dan sektor Bangunan. Sektor sektor yang bertambah peranannya dalam tahun 1997 berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 1993 berturut-turut sebagai berikut; sektor Listrik, Gas dan Air bersih mempunyai pertambahan peran sebesar 0,10 % dari 1,14 % pada tahun 1996 menjadi 1,24 % pada tahun 1997. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai pertambahan peran sebesar 0,81 % yaitu pada tahun 1996 sebesar 19,26 % bertambah pada tahun 1997 menjadi 20,07 %. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi mempunyai pertambahan peran sebesar 0,15 % dari 5,99 % pada tahun 1996 menjadi 6,14 % pada tahun 1997. Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan bertambah 0,18 % dari 6,70 % tahun yang lalu menjadi 6,88 % dalam tahun 1997. Sektor jasa-jasa bertambah

0,05 % dari 10,54 % tahun 1996 menjadi 10,59 % dalam tahun 1997. Sektor Pertanian masih merupakan sektor yang paling besar memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, yaitu masing-masing 44,94 % tahun 1995, 44,81 % pada tahun 1996 dan 43,69 % di tahun 1997.

Tabel 5. Kontribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1995-1997 (%)

Lapangan Usaha	1995	1996	1997
1. Pertanian	44,94	44,81	43,69
1.1 Tanaman Pangan	20,16	20,23	19,43
1.2 Tanaman Perkebunan	13,12	13,11	12,69
1.3 Peternakan	10,20	9,97	10,02
1.4 Kehutanan	0,34	0,33	0,25
1.5 Perikanan	1,12	1,17	1,30
2. Pertambangan dan Penggalan	0,52	0,48	0,46
3. Industri Pengolahan	7,28	7,02	6,97
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,08	1,14	1,24
5. Bangunan	4,26	4,06	3,96
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,74	19,26	20,07
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,04	5,99	6,14
8. Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	6,39	6,70	6,88
9. Jasa-jasa	10,75	10,54	10,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten daerah Tingkat II Jember, Oktober 1998

2.5 Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 pasal 55 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dari pemerintah pusat dan penerimaan pembangunan. PAD terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah (BUMD), dinas-dinas serta penerimaan lain-lain. Pada tabel 6 terlihat kontribusi rata-rata dari komponen PAD Kabupaten Dati II Jember.

Tabel 6. Kontribusi Rata-rata Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember Tahun Anggaran 1993/1994-1997/1998 (000 rupiah)

No.	Komponen Penerimaan PAD	Tahun Anggaran				
		93/94	94/95	95/96	96/97	97/98
1.	Pajak daerah	1.358.851	2.288.180	2.858.947	3.459.198	3.600.843
2.	Retribusi daerah	4.492.022	5.118.865	5.784.300	6.124.769	6.967.387
3.	Perush. daerah	520.455	522.165	1.030.600	4.237.476	1.669.413
4.	Pen. dinas-dinas	0	11.816	757.122	881.836	1.030.162
5.	Pen. lain-lain	198.153	169.269	276.410	344.792	741.749
	Total	6.569.483	8.110.296	10.707.381	15.048.072	14.009.056

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Jember, Oktober 1998

Pada tabel 6 terlihat bahwa secara keseluruhan PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari keseluruhan PAD yang memberikan kontribusi terbesar adalah retribusi daerah, dimana selama tahun anggaran 1993/1994-1997/1998 memberikan kontribusi sebesar 52,59 %.

2.6 Pertumbuhan Pasar

Penyebaran pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember sudah merata pada seluruh kecamatan, walaupun masih terdapat beberapa kecamatan yang tidak memiliki pasar yakni Kecamatan Jelbuk, Jombang, Semboro, Pakusari dan Kaliwates. Hal ini

disebabkan kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit sehingga cukup dengan pasar yang ada di kecamatan terdekat.

Pertumbuhan jumlah pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tidak begitu pesat dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 yakni untuk pasar Pemda sebesar 1,3 persen dan 1,5 persen untuk pasar desa. Mengenai pengenaan tarif retribusi pasar selama periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 tidak mengalami kenaikan baik itu pasar utama maupun pasar kelas III (Dinas Pasar Daerah Jember, 1998).

Adapun klasifikasi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, yaitu:

1. Pasar khusus (utama), dengan kriteria :
 - a) fisik bangunan permanen
 - b) radius pelayanan seluruh wilayah
 - c) jenis komoditi: elektronik, emas, buah-buahan, ikan, sayuran
 - d) letak pasar di tengah kota
2. Pasar kelas I, dengan kriteria :
 - a) fisik bangunan permanen
 - b) radius pelayanan seluruh wilayah
 - c) jenis komoditi: elektronik, emas, mracang, palen, buah-buahan, ikan, sayuran
 - d) letak pasar di tengah kota
3. Pasar kelas II, dengan kriteria :
 - a) fisik bangunan permanen
 - b) radius pelayanan adalah kecamatan
 - c) jenis komoditi: mracang, palen, ikan, sayuran
 - d) letak pasar di tengah kota
4. Pasar kelas III, dengan kriteria :
 - a) fisik bangunan sementara
 - b) radius pelayanan lokal
 - c) jenis komoditi: ikan dan sayuran
 - d) letak pasar di kampung atau pinggiran kota

III. LANDASAN TEORI

3.1 Pembangunan Daerah

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari faktor pembiayaan. Dalam suatu pembangunan, faktor biaya mempunyai keterkaitan yang erat sekali. Tanpa adanya sumber pembiayaan maka pembangunan tidak akan terjamin pelaksanaannya, meskipun dalam pelaksanaan pembangunan sumber pembiayaan bukanlah satu-satunya faktor utama. Semakin besar jumlah dana yang tersedia maka semakin banyak pula jumlah kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan, semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian dana tersebut.

Manulang (dalam Kaho, 1988:61) menyatakan bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Makin baik keuangan suatu negara, maka stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya jika keuangan negara tersebut kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan berbagai kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi keuangan daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam menyelenggarakan rumah tangganya, pemerintah daerah membutuhkan pembiayaan atau dana. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamuji (dalam Kaho, 1988:124) menegaskan pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya.

3.2 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Pembagian daerah administrasi negara di Indonesia dituntut adanya suatu sistem keuangan negara yang akan dapat menjamin kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam hal pemerintah harus menyediakan jasa-jasa publik, maupun dalam hal negara harus mengumpulkan dana lewat berbagai sumber. Hubungan keuangan antar pemerintah menunjuk pada hubungan keuangan antar berbagai tingkatan pemerintah dalam suatu negara dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan negara dan pola pengeluarannya termasuk kekuasaan dari pemerintah yang lebih tinggi terhadap tingkat pemerintah yang lebih rendah (Suparmoko, 1987:306).

Tujuan utama hubungan keuangan pusat dan daerah adalah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian ini, bagaimana agar antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai. Lebih mendasar lagi, hubungan pusat dan daerah menyangkut pembagian kekuasaan dalam pemerintah. Hak mengambil keputusan mengenai anggaran pemerintah dan bagaimana memperoleh dan membelanjakannya, merupakan unsur yang sangat penting untuk menjalankan kekuasaan. Hubungan keuangan pusat dan daerah mencerminkan tujuan politik yang mendasar sekali karena perannya dalam menentukan bobot kekuasaan yang dijalankan pemerintah daerah dalam keseluruhan sistem pemerintah (Devas, 1989:179).

Menurut Davey (1988:255) hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat dilakukan berdasarkan pendekatan kapitalis, pendekatan sumber pendapatan, pendapatan belanja dan dapat pula berdasarkan pendekatan komprehensif. Pendekatan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. pendekatan kapitalis, yaitu hubungan antara pusat dan daerah dalam segi keuangan pemerintah pusat mengadakan investasi yang diberikan, sehingga memberikan keuntungan bagi penanam modal atau investasi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

2. pendekatan sumber pendapatan, yaitu pemerintah pusat memberikan sumber-sumber pendapatan pada pemerintah daerah. Pemberian ini berupa wewenang untuk menikmati sebagian pungutan yang dilakukan atas nama pusat.
3. pendekatan pengeluaran, yaitu pendekatan yang mendasarkan diri pada pengeluaran-pengeluaran bagi pemerintah daerah.
4. pendekatan komprehensif, yaitu pemberian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan sendiri untuk membiayai pengeluaran daerah dan mencoba mempertemukan sumber-sumber pendapatan dan target belanja. Sumber pendapatan yang dikelola daerah sendiri merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila PAD yang ada masih kurang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah maka kekurangannya mendapat bantuan dari pusat.

Mamesah (1995:23) mengemukakan pandangan terhadap hubungan keuangan negara dan keuangan daerah melalui tiga aspek atau sudut pandang yaitu :

1. aspek penyelenggaraan pemerintah di daerah, berdasarkan prinsip asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah maka daerah-daerah tidak hanya melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, akan tetapi melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah kekuasaannya dengan sumber-sumber keuangan sendiri yang masih sangat terbatas. Dengan keterbatasan sumber keuangan tersebut pemerintah melalui APBD menyalurkan sumber dana seperti sumbangan-sumbangan dana ganjaran serta subsidi dan bantuan pembangunan berupa inpres program.
2. aspek pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, aspek ini menegaskan bahwa kebijaksanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berdasarkan pada trilogi pembangunan, dimana perlu adanya keserasian dan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

3. aspek pengawasan, dimana pengawasan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas umum pemerintah dengan daerah-daerah serta untuk lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dinyatakan bahwa sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah didasarkan pada (Zadjuli, 1996:3) :

1. asas dekonsentrasi, dalam arti pelaksanaan kegiatan di daerah dilaksanakan oleh cabang unit-unit kegiatan pemerintah di pusat. Delegasi kewenangan tidak diberikan sepenuhnya, dan dalam banyak hal hanya merupakan alat pelaksana tugas-tugas pemerintah pusat yang perlu dilakukan di daerah tersebut.
2. asas desentralisasi, dalam arti sebenarnya, seringkali disebut juga dengan pemberian otonomi. Dalam hal ini terdapat suatu delegasi kewenangan secara hukum yang berarti penyerahan tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
3. asas tugas pembantuan, untuk kegiatan-kegiatan tertentu di daerah beberapa bagian kegiatan pemerintahan pusat dapat dilakukan dalam hubungan kerja dengan pemerintah daerah. Bentuk-bentuk pembantuan adalah dimana tugas-tugas pekerjaan dalam kewenangan pemerintahan pusat diserahkan penyelenggaraannya pada pemerintah daerah.

Mengingat adanya tiga asas tersebut maka di Indonesia dikenal empat hubungan keuangan pusat dan daerah sebagai berikut :

1. kegiatan pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai oleh pusat,
2. kegiatan daerah dalam rangka tugas pembantuan dibiayai oleh yang memberikan tugas,
3. kegiatan daerah dalam rangka desentralisasi pada dasarnya dibiayai oleh daerah yang bersangkutan,

4. dalam hal keadaan keuangan daerah yang bersangkutan tidak mampu membiayai tugas otonominya (desentralisasi) maka pusat dan daerah atasannya memberikan sejumlah subsidi.

3.3 Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Dalam keuangan daerah sebagai badan publik yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga dengan keuangannya sendiri, terlebih dahulu perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dasar mengenai sumber penghasilan dan pembiayaan daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dimana tujuan otonom pada daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam bidang pelayanan umum dan pembangunan masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan politik dan kesehatan bangsa.

Agar daerah dapat mengurus rumah tangga sendiri dengan sebaik-baiknya maka daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan diberikan pada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mamesah (1995:93) mengungkapkan sumber-sumber penerimaan daerah yang dijelaskan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud sumber pendapatan daerah adalah:

- a. pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri yang terdiri dari : 1) hasil pajak daerah, 2) hasil retribusi daerah, 3) hasil perusahaan daerah, 4) lain-lain usaha daerah.
- b. pendapatan yang berasal dari pemerintah yang terdiri dari : 1) sumbangan dari pemerintah, 2) sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. lain-lain pendapatan yang sah

Hasil penerimaan penyelenggaraan pemerintah sehari-hari digunakan untuk membiayai pembangunan yang telah direncanakan. Dalam APBD, pos penerimaan diklasifikasikan ke dalam penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan. Penggolongan ini didasarkan pada fungsi pengeluaran rutin yang dibiayai dengan pendapatan rutin dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai pendapatan pembangunan.

3.4 Kriteria Penerimaan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Retribusi merupakan pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara (Sumitro, 1979:17). Pengertian lain menyatakan bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak dapat menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah maka tidak akan dikenai iuran tersebut (Munawir, 1980:4).

Amin (1982:15) mengemukakan pandangan tentang penilaian retribusi dari kriteria umum adalah :

1. kriteria kecukupan elastisitas. Retribusi responsif terhadap pertambahan penduduk dan pendapatan. Retribusi cenderung tidak dapat menyesuaikan dengan inflasi oleh karena hambatan tarif,
2. kriteria pemerataan dan keadilan. Retribusi secara tradisional bersifat regresif,
3. kriteria kemampuan administratif. Retribusi secara teoritis mudah dikenakan dan dipungut, namun dalam kenyataannya sangatlah sulit.
4. kriteria penerimaan politik. Retribusi yang menyangkut pilihan dianggap tidak begitu sensitif, akan tetapi yang menyangkut kebutuhan politik dianggap sangat sensitif,

5. kriteria ekonomi. Retribusi merupakan alat untuk alokasi sumber-sumber ekonomi yang baik,
6. kriteria administrasi daerah. Retribusi merupakan sumber yang dapat bersifat daerah sehingga secara administratif daerah lebih tepat. Kesulitan atau hambatan yang dihadapi adalah penyesuaian tarif, pengawasan dan sanksi.

Seperti halnya pajak, maka retribusi mempunyai beberapa asas antara lain (Sutrisno, 1983:120) :

- a. asas politik finansial, terdiri dari :
 1. penarikan retribusi hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai,
 2. penarikan retribusi hendaknya bersifat ekonomis.
- b. asas ekonomis, terdiri dari :
 1. pemilihan mengenai jenis retribusi yang tepat,
 2. pemilihan mengenai macam-macam retribusi, mengingat adanya berbagai sektor yang dapat dikenai berbagai pungutan.
- c. asas keadilan, terdiri dari :
 1. asas pemungutan bersifat umum,
 2. kesamaan beban.
- d. asas administratif, terdiri dari :
 1. kapasitas penarikan,
 2. keluwesan dalam pungutan,
 3. ongkos pemungutan hendaknya diusahakan sekecil mungkin.

3.5 Retribusi Sebagai Pajak yang bersifat Khusus

Retribusi dapat digolongkan sebagai pajak khusus. Pajak khusus ialah pajak yang ciri-cirinya dan sifatnya kurang lengkap. Sebagai pajak yang bersifat khusus, retribusi harus berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Daerah, disetorkan pada kas negara atau kas daerah dan tidak ditujukan untuk suatu pengeluaran tertentu



(Sutrisno, 1983:132). Bagi yang tidak membayar dapat dikenakan upaya pemaksaan, sifat khusus bagi retribusi adalah terletak pada hubungan prestasi dan kontra prestasi yang langsung dapat ditunjuk.

Dari segi pemerintah, penarikan kontra prestasi (Quid) bersifat khusus yaitu pada seorang wajib pajak tertentu sedang prestasi yang diberikan pemerintah juga bersifat khusus, yaitu : hanya para wajib pajak tertentu yang menikmatinya. Undang-undang yang mengatur retribusi yaitu Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran, pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang dihasilkan oleh daerah. Dengan retribusi daerah pembayaran yang dipungut oleh daerah dimaksudkan sebagai pengelola perusahaan atau usaha yang dapat dianggap sebagai perusahaan.

Dalam pasal 4 ditentukan bahwa retribusi daerah hanya dapat dipungut sedemikian sehingga diperoleh keuntungan yang layak bagi daerah dan pemungutannya ditetapkan sesuai dengan pemakaian atas pekerjaan, usaha dan milik daerah atau dengan jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi tidak boleh merupakan suatu rintangan keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah, tercantum dalam pasal 5. Tentang lapangan retribusi daerah ialah seluruh lapangan pemungutan yang diadakan untuk keuangan daerah sebagai pengganti jasa daerah.

Untuk Pemerintah Daerah Tingkat II, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk pembiayaan pembangunan daerah dan terutama dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam penerimaan pendapatan asli daerah, retribusi daerah selalu mempunyai kontribusi yang lebih besar daripada pajak daerah. Hal tersebut karena retribusi mempunyai kelebihan dibandingkan pajak daerah. Perbedaan antara pajak daerah dengan retribusi daerah adalah (Kaho, 1991:155):

retribusi mempunyai kelebihan dibandingkan pajak daerah. Perbedaan antara pajak daerah dengan retribusi daerah adalah (Kaho, 1991:155):

1. lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum diusahakan oleh pemerintah atasannya (pemerintah pusat atau Daerah Tingkat I). Lapangan pajak yang sama tidak boleh diusahakan atau dipungut oleh dua atau lebih instansi atau pihak. Kekembaran dalam pajak tidak diperbolehkan, sedangkan dalam retribusi diperbolehkan,
2. pajak dipungut tanpa mempersoalkan ada atau tidak adanya pemberian jasa oleh daerah. Pemungutan pajak sedikit banyak didasarkan atas unsur paksaan dengan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan pemungutan retribusi didasarkan atas pemberian jasa kepada pemakai jasa. Pembayaran retribusi dilakukan jika pemakai jasa memperoleh atau memakai jasa yang disediakan pemerintah daerah,
3. pajak dibayar oleh orang-orang tertentu yaitu wajib pajak, tetapi retribusi dibayar oleh setiap pemakai jasa yang menikmati jasa dari pemerintah daerah,
4. pada umumnya pajak dikenakan setahun sekali, pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau kredit. Pemungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali terhadap seseorang selama menikmati jasa yang disediakan, serta karena retribusi pada umumnya kecil maka pembayarannya langsung atau kontan.

3.6 Dasar Hukum Retribusi Pasar

Pelaksanaan maupun pengelolaan retribusi pasar harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dasar hukum pemungutannya adalah seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1995 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah,

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaannya berpedoman pada lima prinsip yaitu ;
 - a. berpegangan teguh pada anggaran yang berimbang dan bersifat dinamis,
 - b. melaksanakan disiplin anggaran,
 - c. melaksanakan tertib anggaran,
 - d. dalam penggunaan anggaran atau keuangan daerah harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula serta tidak lebih besar dari anggaran tersebut,
 - e. public saving artinya pengeluaran rutin hendaknya ditekan sedemikian rupa sehingga nantinya akan menunjang biaya-biaya pengeluaran pembangunan.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang pengundangan peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah lewat tenggang waktu pengesahan.

3.7 Subyek dan Obyek Retribusi Pasar

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 3 Tahun 1995, disebutkan subyek retribusi pasar adalah setiap penjual dalam pasar yang memakai atau menggunakan tempat atau bangunan dalam pasar untuk kepentingan usahanya. Obyek retribusi pasar adalah atas penggunaan tempat-tempat dalam pasar yang dapat dikenakan retribusi. Tempat-tempat dalam pasar yang dimaksud adalah :

1. los pasar, yaitu bangunan tetap ataupun tidak tetap yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Jember berbentuk bangunan atau ruang memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas atau pemisah dan pintu yang digunakan sebagai tempat bagi pedagang membuka pasaran,
2. toko atau kios, yaitu bangunan tetap yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Jember, berbentuk petak-petak yang dilengkapi dinding pembatas dan pintu yang digunakan sebagai tempat berdagang,

3. rumah toko atau ruko, yaitu bangunan bertingkat yang lantai satunya dipergunakan sebagai tempat kegiatan perdagangan sedangkan lantai berikutnya digunakan untuk tempat tinggal atau gudang,
4. bangunan atau bedak, yaitu bangunan sementara atau tidak permanen yang terpisah satu dengan lainnya dengan dinding pembatas dan didirikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Jember dan atau pedagang atau pengusaha di dalam lingkungan pasar serta dipergunakan sebagai tempat untuk berdagang,
5. warung, yaitu bangunan di dalam lingkungan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit khususnya dipergunakan untuk usaha berjualan makanan dan atau minuman,
6. tempat dasar, yaitu ruangan-ruangan dalam luas pasar, bedak atau tempat-tempat lainnya dalam pasar yang dapat dipergunakan oleh pedagang atau pengusaha untuk memperagakan atau menawarkan dagangan atau usahanya.

Berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU) yang dipergunakan di pasar umum diadakan penggolongan sebagai berikut (Perda Nomor 3 Tahun 1995:5):

- a) LTU 1 yakni toko atau kios yang menghadap keluar,
- b) LTU 2 yakni toko atau kios yang menghadap kedalam,
- c) LTU 3 yakni toko atau kios, bedak di dalam los pasar,
- d) LTU 4 yakni los terbuka di dalam pasar,
- e) LTU 5 yakni halaman pasar dalam areal pasar.

Berdasarkan jenis dagangan yang dijual di pasar umum, diadakan penggolongan sebagai berikut (Perda Nomor 3 Tahun 1995:5):

- a) golongan A : logam mulia, tekstil dan yang disamakan,
- b) golongan B : konfeksi, kelontong, alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan, daging, ikan dan yang disamakan,
- c) golongan C : hasil bumi, buah-buahan, sayur-mayur, unggas, rempah-rempah, makanan dan yang disamakan,

- d) golongan D : gerabah, anyam-anyaman, barang bekas, alat pertanian, klitikan dan yang disamakan.

Ditinjau dari siapa yang mendirikan atau mengusahakannya maka pasar di Kabupaten daerah Tingkat II Jember dibagi dalam (Perda Nomor 3 Tahun 1995:2):

1. pasar daerah, yaitu suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan baik siang maupun malam hari yang terdiri dari bangunan-bangunan pasar, halaman dan fasilitas lainnya seperti toko, los, bedak, halaman terbuka, rumah toko dan bangunan lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Jember,
2. pasar desa, yaitu pasar yang penguasaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan oleh desa dan semata-mata digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa didasarkan keputusan rembug desa. Dalam pengelolaannya dilakukan langsung oleh Pemerintah daerah tingkat II Jember dan kepada desa diberikan sebesar 20 persen dari pendapatan pasar tersebut yang prioritas dan urgensi penggunaannya untuk pembangunan desa yang bersangkutan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam usaha pembinaan ke arah pendewasaan keuangan desa untuk menunjang pembangunan desa.

3.8 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Berdasarkan tata kerja perusahaan daerah pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut (Perda Nomor 3 Tahun 1995:9):

1. atas penggunaan atau pemakaian tempat dalam pasar dikenakan retribusi,
2. besarnya retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (lampiran 9),
3. pembayaran retribusi dilakukan setiap hari,

4. untuk setiap pembayaran retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasi,
5. untuk pembayaran retribusi secara berlangganan dilakukan setiap awal bulan dengan ketentuan menggunakan kartu langganan yang telah diporporasi,
6. bentuk, warna dan tata cara pengisian kartu langganan ditetapkan oleh Kepala Daerah,
7. setiap penerbitan Surat Ijin Menempati (SIM) atas pemanfaatan bangunan dalam pasar dikenakan retribusi : a) toko atau kios, ruko sebesar Rp. 20.000,- ; b) bedak atau bedak dalam los pasar sebesar Rp. 10.000,-,
8. bagi para pedagang dan pemilik toko atau kios, ruko yang berada di lingkungan pasar dikenakan retribusi sebesar 25 persen dari tarif retribusi pasar yang berlaku,
9. ternak atau hewan yang dibawa masuk ke dalam pasar hewan untuk diperjualbelikan atau keperluan lainnya dipungut retribusi sebagai berikut : a) ternak besar seperti kuda, sapi kerbau sebesar Rp. 1.000,- ; b) ternak kecil seperti domba, kambing sebesar Rp. 500,-,
10. hasil penerimaan retribusi disetorkan ke kas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerimaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

PAD dikategorikan sebagai penerimaan rutin dalam APBD pada Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia. Pada tabel 7 target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember selama kurun waktu lima tahun anggaran tersebut menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tiga periode yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 mengalami peningkatan sampai melebihi target yaitu 105,51 %, 104,4 % dan 100,93 %. Akan tetapi pada tahun anggaran 1997/1998 mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan yaitu 98,65 %. Hal ini disebabkan keadaan lapangan yang selalu berubah-ubah karena perekonomian yang mengalami kelesuan akibat krisis moneter yang berkepanjangan serta sumber pendapatan yang masih belum diupayakan secara optimal. Secara rata-rata realisasi penerimaan PAD telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100,05 %.

Tabel 7. Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994-1997/1998

Tahun Anggaran (1)	Target (Rupiah) (2)	Realisasi (Rupiah) (3)	Persentase (%) (3 : 2)
1993/1994	7.182.732.000.00	6.569.483.374,81	91,46
1994/1995	7.694.588.063.00	8.110.296.839,42	105,51
1995/1996	10.281.121.418,79	10.707.381.558,79	104,14
1996/1997	14.909.142.038,15	15.048.072.696,39	100,93
1997/1998	14.201.096.581.00	14.009.556.049,90	98,65
Rata - rata			100,05

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Oktober 1998

4.2 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

4.2.1 Pungutan Retribusi Daerah

Retribusi diartikan sebagai suatu pembayaran yang dikaitkan langsung dengan pelayanan dan dikenakan berdasarkan pemikiran bahwa penyediaan pelayanan tertentu tidak mungkin diberikan untuk semua orang dimana keperluan seseorang berbeda-beda dan menyangkut soal pemilihan. Jenis-jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember adalah :

1. uang leges (pengesahan atau cetak)
2. uang dispentan (dispensasi jembatan)
3. uang pemeriksaan atau pembantaian hewan
4. uang sewa tanah dan bangunan
5. uang sempadan atau rooi (ijin mendirikan bangunan)
6. uang penguburan
7. STNK tak bermotor
8. stasiun bus dan taxi
9. RSUD dan balai pengobatan
10. tempat rekreasi
11. pasar
12. pesanggrahan
13. parkir
14. sipa (surat ijin perusahaan angkutan)
15. kartu ternak
16. kebersihan
17. pendaftaran KTP
18. Ambulans dan mobil jenazah
19. sewa alat berat
20. pemadam api

21. peron
22. ijin trayek
23. ipair (iuran pelayanan irigasi)

4.2.2 Peranan Retribusi Daerah terhadap PAD

Peranan dan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap struktur PAD selama kurun waktu anggaran 1993/1994-1997/1998 secara keseluruhan mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat seperti pada tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

Tahun Anggaran	Retribusi Daerah (Rupiah)	PAD (Rupiah)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(2 : 3)
1993/1994	4.492.022.985,94	6.569.483.374,81	68,37
1994/1995	5.118.865.222.00	8.110.296.839,42	63,11
1995/1996	5.784.300.869,50	10.707.381.558,79	54,02
1996/1997	6.124.769.215,56	15.048.072.696,39	40,72
1997/1998	6.967.387.104,46	14.009.556.049,90	49,75
Rata - rata			54,86

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Oktober 1998

Pada tabel 8 diketahui kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember selama kurun waktu lima tahun anggaran rata-rata sebesar 54,86 %. Penurunan terjadi dari tahun ke tahun kecuali pada tahun anggaran 1997/1998 terjadi kenaikan sebesar 9,03 % yaitu dari 40,72 % menjadi 49,75 %.

4.2.3 Peranan Retribusi Pasar terhadap PAD

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial bagi perolehan retribusi daerah selama ini. Bersama-sama dengan pungutan parkir,

RSU atau balai pengobatan, kebersihan dan sempadan atau rooi merupakan sumber-sumber penerimaan yang memberikan kontribusi yang besar bagi retribusi daerah.

Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember selama kurun waktu lima tahun anggaran secara keseluruhan mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 10,21 %. Pada kurun waktu empat tahun anggaran yakni tahun 1993/1994 sampai dengan tahun 1996/1997 mengalami penurunan sebesar 4,35 % yaitu dari 12,49 % menjadi 8,14 %. Peningkatan terjadi pada tahun anggaran 1997/1998 sebesar 1,28 % dari tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 9. Perkembangan Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994-1997/1998

Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rupiah)	PAD (Rupiah)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(2 : 3)
1993/1994	819.993.220	6.569.483.374,81	12,49
1994/1995	922.304.490	8.110.296.839,42	11,37
1995/1996	1.047.157.040	10.707.381.558,79	9,78
1996/1997	1.225.419.443	15.048.072.696,39	8,14
1997/1998	1.320.798.605	14.009.556.049,90	9,42
Rata - rata			10,21

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Oktober 1998

4.3 Elastisitas Retribusi Pasar

Elastisitas yang akan diamati disini adalah elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB, jumlah penduduk dan inflasi. Elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan penerimaan retribusi pasar terhadap laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Elastisitas retribusi pasar terhadap jumlah penduduk digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan penerimaan retribusi pasar terhadap laju pertumbuhan jumlah penduduk. Elastisitas retribusi pasar terhadap inflasi digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan penerimaan retribusi pasar terhadap laju pertumbuhan inflasi.

4.3.1 Elastisitas Retribusi Pasar terhadap PDRB

Elastisitas retribusi pasar secara keseluruhan pada tabel 10 terhadap PDRB selama kurun waktu lima tahun anggaran yaitu tahun 1993/1994-1997/1998 menunjukkan angka elastisitas positif dengan rata-rata sebesar 1,67. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar cenderung elastis terhadap laju pertumbuhan PDRB. Jika terjadi peningkatan PDRB sebesar 1 % akan mengakibatkan kenaikan penerimaan retribusi pasar sebesar 1,67 %. Peningkatan elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB dari tahun ke tahun tidak terlalu besar, bahkan mengalami penurunan pada tahun anggaran 1997/1998 sebesar 0,24.

Tabel 10. Elastisitas Retribusi Pasar Terhadap PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

Tahun Anggaran	Retribusi Pasar		PDRB		Elastisitas (3 : 5)
	Rupiah	%	(Rp.000.000)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1993/1994	819.993.220	12,47	1.696.849,49	8,35	1,49
1994/1995	922.304.490	13,53	1.838.604,18	8,60	1,57
1995/1996	1.047.157.040	17,02	1.996.764,71	8,71	1,95
1996/1997	1.225.419.443	7,77	2.170.699,24	4,54	1,71
1997/1998	1.320.798.605	-	2.269.330,52	-	-
Rata - rata					1,67

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Oktober 1998

4.3.2 Elastisitas Retribusi Pasar terhadap Jumlah Penduduk

Elastisitas retribusi pasar pada tabel 11 terhadap jumlah penduduk selama tahun anggaran 1993/1994-1997/1998 menunjukkan angka elastisitas positif yaitu rata-rata sebesar 13,05 %. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jika terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 % maka akan mengakibatkan peningkatan

penerimaan retribusi pasar sebesar 13,05 %. Demikian juga sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 1 % maka mengakibatkan penurunan penerimaan retribusi pasar sebesar 13,05 %. Elastisitas retribusi pasar terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan menunjukkan angka yang sangat elastis, karena laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember kecil dan relatif stabil.

Tabel 11. Elastisitas Retribusi Pasar Terhadap jumlah Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998

Tahun Anggaran	Retribusi Pasar		Jumlah Penduduk		Elastisitas
	Rupiah	%	Jiwa	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3 : 5)
1993/1994	819.993.220		2.121.859		
1994/1995	922.304.490	12,47	2.142.294	0,96	12,95
1995/1996	1.047.157.040	13,53	2.163.028	0,96	13,98
1996/1997	1.225.419.443	17,02	2.184.070	0,97	17,49
1997/1998	1.320.798.605	7,77	2.205.316	0,97	7,99
Rata - rata					13,05

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Oktober 1998

4.3.3 Elastisitas Retribusi Pasar terhadap Inflasi

Elastisitas retribusi pasar terhadap inflasi yang digunakan pada analisis ini adalah menggunakan laju pertumbuhan inflasi sebagai indikator laju perubahan tingkat harga. Angka laju pertumbuhan inflasi yang tercantum dalam data ini menunjukkan angka persentase laju pertumbuhan tingkat harga.

Elastisitas retribusi pasar terhadap inflasi selama tahun anggaran 1993/1994-1997/1998 menunjukkan angka elastisitas positif, rata-rata sebesar 1,72. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar cenderung elastis terhadap laju

pertumbuhan inflasi. Jika terjadi kenaikan laju inflasi sebesar 1 % akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar sebesar 1,72 %. Demikian juga apabila terjadi penurunan laju inflasi sebesar 1 % maka akan menurunkan penerimaan retribusi pasar sebesar 1,72 %.

Tabel 12. Elastisitas Retribusi Pasar Terhadap Inflasi Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

Tahun Anggaran	Retribusi Pasar		Laju Inflasi %	Elastisitas (3 : 4)
	Rupiah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(3 : 4)
1993/1994	819.993.220			
		12,47	9,53	1,30
1994/1995	922.304.490			
		13,53	8,17	1,65
1995/1996	1.047.157.040			
		17,02	5,36	3,17
1996/1997	1.225.419.443			
		7,77	9,89	0,78
1997/1998	1.320.798.605			
Rata - rata				1,72

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Oktober 1998

4.4 Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

Efektifitas penerimaan retribusi pasar adalah pengukuran hubungan antara hasil penerimaan retribusi pasar terhadap potensi retribusi pasar dengan anggapan semua obyek retribusi pasar memenuhi kewajibannya. Untuk menentukan besarnya potensi retribusi pasar dalam penelitian ini digunakan besarnya target penerimaan retribusi pasar, khususnya yang mempunyai potensi yang besar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Tingkat efektifitas yang memiliki nilai lebih dari satu menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar telah mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan

mencakup potensi yang ada. Sebaliknya apabila tingkat efektifitas memiliki nilai kurang dari satu, maka hal ini menunjukkan penerimaan retribusi pasar belum mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat efektifitas yang baik adalah yang memiliki nilai satu, hal ini berarti dalam penetapan target retribusi pasar telah mencakup semua potensi pasar yang ada, serta dalam memperoleh hasil yang optimal dapat mengatasi hambatan yang ada di lapangan.

Efektifitas penerimaan retribusi pasar secara keseluruhan pada tabel 13 selama tahun anggaran 1993/1994-1997/1998 menunjukkan angka yang berfluktuasi, dengan tingkat efektifitasnya lebih dari satu. Secara rata-rata efektifitas penerimaan retribusi pasar sebesar 1,069 yang berarti telah mencapai target yang telah ditetapkan dan mencakup potensi yang ada.

Tabel 13. Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas
(1)	(2)	(3)	(3 : 2)
1993/1994	767.500.000	819.993.220	1,07
1994/1995	840.000.000	922.304.490	1,09
1995/1996	980.000.000	1.047.157.040	1,06
1996/1997	1.125.000.000	1.225.419.443	1,08
1997/1998	1.240.000.000	1.320.798.605	1,06
Rata - rata			1,069

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Oktober 1998

4.5 Efisiensi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

Efisiensi penerimaan retribusi pasar adalah pengukuran hasil penerimaan retribusi pasar yang digunakan untuk menutup biaya atau pengeluaran dalam memperoleh penerimaan tersebut. Biaya disini adalah semua pengeluaran yang

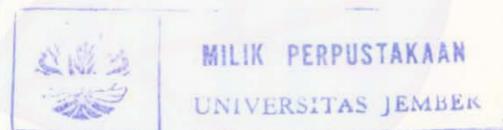
dikeluarkan oleh Dispenda untuk merealisasikan penerimaan retribusi pasar. Efisiensi yang baik adalah apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan retribusi pasar ditekan serendah mungkin.

Pada tabel 14 koefisien efisiensi penerimaan retribusi pasar selama tahun anggaran 1993/1994-1997/1998 menunjukkan adanya peningkatan. Secara rata-rata tingkat efisiensi penerimaan retribusi pasar sebesar 0,100. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun anggaran 1994/1995 yaitu dari 0,046 menjadi 0,086 atau sebesar 0,04 dan peningkatan terendah terjadi pada tahun anggaran 1996/1997 yaitu dari 0,112 menjadi 0,120 atau sebesar 0,008. Berdasarkan tabel 14, dapat diketahui bahwa nilai dari koefisien efisiensi retribusi pasar mengalami peningkatan atau semakin besar. Hal tersebut menunjukkan tingkat efisiensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember mengalami penurunan, karena persentase kenaikan biaya pemungutan retribusi pasar relatif lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan realisasi penerimaan retribusi pasar.

Tabel 14. Efisiensi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

Tahun Anggaran (1)	Biaya Pengumpulan (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Efisiensi (2 : 3)
1993/1994	37.959.000	819.993.220	0,046
1994/1995	79.381.000	922.304.490	0,086
1995/1996	117.824.000	1.047.157.040	0,112
1996/1997	147.983.000	1.225.419.443	0,120
1997/1998	188.394.000	1.320.798.605	0,142
Rata - rata			0.100

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Oktober 1998



4.6 Pembahasan

Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk (Munawir, 1980:4). Thie Liang Gie (dalam Kaho, 1991:78) menyebutkan retribusi daerah merupakan pembayaran atau pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah. Penegertian lain menyatakan bahwa retribusi daerah adalah penerimaan yang diterima oleh penguasa publik dari rumah tangga swasta sebesar norma-norma umum yang ditetapkannya berhubungan prestasi yang diselenggarakan atas usul dan kepentingan rumah tangga swasta dan prestasi-prestasi tersebut, karena berhubungan dengan kepentingan umum secara khusus dilaksanakan sendiri penguasa publik (Fieldman, dalam Geodhrat 1973:90)

Berdasarkan peraturan umum retribusi daerah (UU Darurat Nomor 12 Tahun 1957) menurut pasal 8 disebutkan 18 macam aktivitas yang dapat dikenakan retribusi, diantaranya adalah retribusi pasar dimana pada umumnya retribusi pasar ini mempunyai kontribusi paling besar (Sutrisno, 1983:214). Hasil penelitian terhadap beberapa Daerah Tingkat II yang dilakukan oleh Fisipol UGM bekerjasama dengan Depdagri pada tahun 1982 (dalam Kaho, 1991:152), menunjukkan bahwa sumbangan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup besar, diantaranya adalah Lombok Barat (55,9 %), Bukit Tinggi (37,8 %) dan Hulu sungai (35,5 %).

Retribusi pasar akan berkembang mengikuti perkembangan pembangunan dan tidak akan bersifat statis. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pembangunan akan menciptakan output yang tinggi sehingga kebutuhan sarana dan prasarana akan meningkat pula untuk disediakan. Hasil penelitian yang dilakukan Sarwedi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember (1992:25) menyatakan penerimaan dari retribusi pasar terus meningkat sampai dengan pelita V sampai tahun keempat. Peningkatan ini disebabkan beberapa hal diantaranya adalah adanya pembangunan yang meningkat yang digalakkan oleh pemerintah daerah menuntut pemenuhan kebutuhan akan sarana

dan prasarana yang semakin meningkat pula, tidak terkecuali kebutuhan akan sarana dan prasarana pasar.

Berdasarkan pada tabel 9 dapat dijelaskan bahwa kontribusi atau sumbangan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya relatif stabil dan cenderung mengalami penurunan. Sumbangan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1993/1994 yaitu sebesar 12,49 %, dimana pada tahun tersebut besarnya pendapatan asli daerah Rp. 6.569.482.374,81,- dan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp.819.993.220,-. Besarnya sumbangan retribusi pasar pada tahun anggaran 1993/1994 disebabkan karena diberlakukannya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No. HK.004.2/06/1982 tentang pengelolaan keuangan pasar desa secara langsung oleh pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember untuk pembangunan desa. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan berdasarkan pada asas bimbingan dan pembinaan, maka semua hasil pendapatan pasar-pasar desa harus dimasukkan dalam kas pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dan kepada desa diberikan 20 % dari hasil pendapatan pasar tersebut, juga prioritas dan penggunaannya untuk pembangunan bagi desa yang bersangkutan. Kenaikan retribusi pasar dan pendapatan asli daerah yang cukup besar terjadi pada tahun anggaran 1996/1997. Pada tahun anggaran yang sama yaitu tahun 1996/1997 sumbangan retribusi pasar terhadap penerimaan asli daerah memberikan sumbangan terkecil, dikarenakan secara keseluruhan komponen PAD yang lain juga meningkat cukup pesat dengan tingkat pertumbuhan yang lebih besar dari tingkat pertumbuhan retribusi pasar.

Menurunnya sumbangan retribusi pasar terhadap PAD secara keseluruhan selama tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998 disebabkan antara lain: 1) mutu pelayanan kurang, 2) administrasi retribusi pasar belum tertib 3) pemungutan kurang efektif karena kurangnya tenaga ahli, 4) kondisi sosial dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar.

Hasil analisis elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB, jumlah penduduk dan inflasi di Kabupaten Dati II Jember selama tahun anggaran 1993/1994-1997/1998 pada tabel 10,11,12 menunjukkan angka elastisitas yang positif dan lebih besar dari satu. Hal ini berarti pertumbuhan retribusi pasar relatif elastis terhadap pertumbuhan PDRB, jumlah penduduk dan inflasi. Dengan semakin meningkatnya tingkat PDRB, jumlah penduduk dan inflasi maka retribusi pasar juga mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB akan menyebabkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah sehingga jumlah barang dan jasa yang masuk dalam pasar akan semakin banyak dan aktivitas pasar meningkat. Peningkatan aktivitas pasar mendorong pemerintah daerah untuk memperluas dan menambah fasilitas-fasilitas yang ada di pasar karena meningkatnya permintaan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi akan menambah jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh penduduk sehingga menambah jumlah konsumen yang memasuki pasar akan bertambah, dalam upaya usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Peningkatan inflasi yang terjadi selama periode 1993/1994 - 1997/1998 tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan retribusi pasar, hal tersebut dikarenakan jumlah pemakai jasa atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah semakin meningkat (lampiran 10).

Hasil perhitungan efektifitas penerimaan retribusi pasar selama tahun anggaran 1993/1994-1997/1998 pada lampiran 5 menunjukkan angka yang berfluktuasi, dengan tingkat efektifitasnya lebih dari satu. Secara rata-rata efektifitas penerimaan retribusi pasar sebesar 1,069 yang berarti dalam penetapan target retribusi pasar telah mencakup potensi pasar yang ada, serta dalam memperoleh hasil yang optimal dapat mengatasi hambatan yang ada di lapangan.

Hasil perhitungan efisiensi retribusi pasar selama tahun anggaran 1993/1994-1997/1998 pada lampiran 6 menunjukkan tingkat efisiensi yang menurun. Penurunan ini disebabkan persentase kenaikan biaya pengumpulan retribusi pasar relatif lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan realisasi penerimaan retribusi pasar.

Akan tetapi secara keseluruhan, manfaat yang diperoleh dari retribusi pasar masih lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Hasil analisis dari elastisitas, efektifitas dan efisiensi adalah sebagai tolok ukur untuk menilai potensi retribusi pasar sebagai komponen dari penerimaan daerah. Potensi retribusi pasar merupakan hasil yang ingin dicapai. Untuk mencapai hasil yang optimal, Dinas Pasar Daerah harus mengintensifkan kegiatannya sehingga dapat memudahkan dalam perencanaan dan penentuan strategi di lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya retribusi pasar antara lain: jenis dan kelas pasar, tarif retribusi, jumlah pedagang penyewa fasilitas pasar dan kemampuan petugas retribusi pasar.

Berdasarkan hasil penelitian Sarwedi (1992:33), penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember selama ini masih menggunakan sistem target, yaitu suatu besaran jumlah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan harus dipenuhi oleh pasar. Sistem target tersebut mengacu pada penerimaan sebelumnya, kemudian dengan pertimbangan yang ada ditetapkan target yang harus dicapai pada tahun anggaran yang akan datang. Kelemahan sistem ini yaitu tidak memperhitungkan faktor penghambat dan pendukung dalam pemungutan retribusi pasar. Penerimaan retribusi pasar selain dipengaruhi oleh tarif juga dapat dipengaruhi oleh banyak penjual dalam pasar, aktivitas penduduk, kemampuan petugas dan sebagainya.

Peningkatan penerimaan retribusi pasar sangat mungkin dilakukan karena retribusi mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah (Kaho, 1991:155): 1) peluang untuk menciptakan jenis retribusi baru terbuka lebar, 2) pungutan yang didasarkan pada manfaat atas pemakaian fasilitas atau jasa pemerintah dapat langsung dinikmati, 3) pembayaran dilakukan oleh setiap pemakai jasa atau tidak tergantung pada orang atau badan usaha tertentu (subyek retribusi).

Dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah khususnya pasar perlu memperbaiki efektifitas dan efisiensi dalam aspek penerapan sistem dan prosedur

administrasi penerimaan retribusi daerah dengan melihat keunggulan dan kelemahannya (Devas, 1989:144).

Keunggulan dari sistem dan prosedur administrasi retribusi daerah adalah pemungutan berdasar peraturan daerah sehingga terdapat legalitas dalam pemungutannya dan keseragaman pedoman bagi daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi mengenai jenis obyek dan tarif retribusi. Kelemahan dari sistem dan administrasi retribusi daerah antara lain : masalah pengontrolan, menyangkut keinginan politik untuk mengenakan sanksi dan integritas; pertanggungjawaban bagi retribusi daerah berubah-ubah sesuai dengan konsumsi sehingga sulit untuk mengetahui apa yang diterima oleh pemungut (Davey, 1988:151). Kurang proporsionalnya konsumsi dengan pendapatan menyebabkan retribusi dipandang bukan suatu alat pemerataan.

Menyadari akan kelemahan-kelemahan tersebut pemerintah telah mengambil langkah strategis yaitu pembaharuan Undang-undang retribusi daerah yang diharapkan mampu berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah. Dengan ditetapkannya UU RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah dan menyederhanakan jenis pajak dan retribusi daerah. Penyederhanaan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi daerah mengingat potensinya yang besar pada setiap daerah. Perbaikan dalam sistem dan prosedur administrasi serta perundang-undangan belum menjamin dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah tanpa disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember selama lima tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan tahun anggaran 1997/1998, dapat disimpulkan :

1. sumbangan penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah relatif besar dengan rata-rata sumbangan sebesar 10,21 % per tahun anggaran. Hal tersebut merupakan salah satu sumbangan terbesar bila dibandingkan dengan retribusi lainnya.
2. tingkat elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB, jumlah penduduk dan inflasi adalah :
 - a) pertumbuhan retribusi pasar cenderung elastis terhadap laju pertumbuhan PDRB dengan koefisien elastisitas rata-rata sebesar 1,67,
 - b) pertumbuhan retribusi pasar cenderung elastis terhadap laju pertumbuhan jumlah penduduk dengan koefisien elastisitas rata-rata sebesar 13,05,
 - c) pertumbuhan retribusi pasar cenderung elastis terhadap laju pertumbuhan inflasi dengan koefisien elastisitas rata-rata sebesar 1,72.

Dengan koefisien elastisitas rata-rata sebesar 13,05 penerimaan retribusi pasar pertumbuhannya sangat elastis terhadap laju pertumbuhan jumlah penduduk, yang berarti jumlah penduduk merupakan sumber potensial bagi peningkatan penerimaan retribusi pasar. Hal tersebut disebabkan jumlah penduduk yang meningkat disertai dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk sehingga tingkat konsumsi akan semakin tinggi dan aktivitas pasar akan meningkat.

3. Efektifitas penerimaan retribusi pasar cukup baik dengan tingkat rata-rata efektifitas retribusi pasar sebesar 1,069. Hal tersebut menunjukkan penerimaan retribusi pasar sudah efektif namun kurang optimal. Upaya yang dilakukan Pemda kurang maksimal baik dalam perencanaan maupun pengelolaan potensi-potensi pasar yang terdapat di daerahnya.
4. Efisiensi penerimaan retribusi pasar menurun atau kurang efisien dengan tingkat rata-rata efisiensi 0,100. Kurangnya efisiensi tersebut terlihat dari persentase kenaikan biaya pemungutan retribusi pasar yang relatif lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan realisasi penerimaan retribusi pasar.

5.2 Saran

1. Dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, maka perencana daerah perlu melakukan pendataan mengenai obyek yang ingin diupayakan dalam retribusi daerah, karena dengan data yang lengkap serta akurat maka dapat diproyeksi target yang sesuai dengan potensi yang ada.
2. Perlu dilakukan peninjauan kembali kesesuaian antara kebijaksanaan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemungutan, jenis yang dikenakan pungutan, besarnya pungutan dan lain-lainya.
3. Perlu peningkatan kualitas sumber daya yang ada, baik manusia maupun sarana dan prasarana yang ikut menunjang dalam melaksanakan pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga upaya yang dilakukan dalam menggali dan mengelola potensi-potensi pasar dapat lebih maksimal, seperti pelatihan kerja untuk menambah pengetahuan tentang asas-asas organisasi, disiplin kerja yang tinggi, pengawasan yang efektif, pemantapan koordinasi antar instansi atau lembaga terkait, pengadaan peralatan yang mendukung (komputerisasi), perluasan pasar dengan menambah jumlah kios dan los pasar, pembangunan pasar baru yang perlu, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin H, 1982. *Keuangan Negara dan Daerah*, Jakarta: LPEM-FEUI.
- Dajan A, 1991. *Pengantar Metode Statistik I*, Jakarta: LP3ES.
- Davey K.J, 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, terjemahan Amarullah dkk, Jakarta: UI-Press.
- Devas N, dkk, 1989. *Financing Local Government in Indonesia*, terjemahan Masri Maris, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Dikti, 1998. *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Republik Indonesia.
- Geodhrat, 1973. *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Daerah*, terjemahan Ratmoko, Jakarta: Djambatan Press.
- Kaho J.R, 1988. *Prospektif Otonomi Daerah di Negara RI*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , 1991. *Perspektif Otonomi Daerah di Negara RI: Identifikasi Beberapa yang mempengaruhi Penyelenggaraannya*, cetakan kedua, Jakarta: Rajawali Press.
- Kantor Statistik, 1993-1997. *Jember dalam Angka*, Jember.
- Mamesah D.J, 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Munawir S, 1980. *Pokok-pokok Perpajakan*, Jakarta: Liberty Press.
- Nasution, dkk, 1986. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Modul 1,2,3, Jakarta: UT.
- Pemerintah Daerah Tingkat II Jember, 1995. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1995*, Jember.
- Rachbini D.J, 1996. *Otonomi, Keuangan Daerah dan Strategi Investasi*, Makalah dalam Samas Penerapan Otonomi Daerah Menyongsong Era Pasar Bebas, Universitas Jember.
- Sarwedi, dkk, 1992. *Estimasi Pendapatan Asli Daerah Pada Pos Penerimaan Retribusi Pasar Berdasarkan Indeks Musim di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember*, Jember: Pusat Penelitian - UNEJ.
- Sumitro, 1979. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bandung: PT. Eresco.

- Suparmoko M, 1987. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi IV, Yogyakarta: BPFE.
- Sutrisno P.H, 1983. *Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta: BPFE - UGM.
- Zadjuli S.I, 1996. *Kepemimpinan dan Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta : Prisma.
- Widjaja A.W, 1992. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: Rajawali Press.



Lampiran I : Kontribusi Rata-rata Komponen PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998 (000 Rupiah)

No.	Komponen PAD	Tahun Anggaran					Jumlah	Proporsi %
		93/94	94/95	95/96	96/97	97/98		
1.	Pajak daerah	1.358.851	2.288.180	2.858.947	3.459.198	3.600.843	13.293.022	24.54
2.	Retribusi daerah	4.492.022	5.118.865	5.784.300	6.124.769	6.957.387	28.487.345	52.59
3.	Pernah daerah	520.455	522.165	1.030.600	4.237.476	1.669.413	7.980.109	14.73
4.	Pen. dinas-dinas	0	11.816	757.122	881.836	1.030.162	2.678.937	4.95
5.	Pen. lain-lain	198.153	169.269	276.410	344.792	741.749	1.730.375	3.19
	Total	6.569.483	8.110.296	10.707.381	15.048.072	14.009.056	54.169.790	100.00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Jember, Oktober 1998

Lampiran 2 : Perhitungan Elastisitas Retribusi pasar terhadap PDRB di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

Tahun Anggaran	Elastisitas = $\frac{\% \text{ Pertumbuhan retribusi pasar}}{\% \text{ Pertumbuhan PDRB}}$	% Pertambahan (Xi)	Log Xi
1993/1994	12,4770 : 8,3539 = 1,4935	101,4935	2,0064
1994/1995	13,5370 : 8,6022 = 1,5736	101,5736	2,0067
1995/1996	17,0234 : 8,7108 = 1,9542	101,9542	2,0084
1996/1997	7,7783 : 4,5437 = 1,7118	101,7118	2,0073
Jumlah			8,0288

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Desember 1998

Untuk menghitung rata-rata elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB selama tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998, digunakan rata-rata ukur sebagai berikut (Dajan, 1991:153) :

$$\begin{aligned} \text{Log } G_m &= \frac{\sum \log X_i}{n} = \frac{8,0288}{4} \\ &= 2,0072 \\ G_m &= \text{Log } 2,0072 \\ &= 101,67168 \text{ atau } 1,67 \% \end{aligned}$$

Lampiran 3 : Perhitungan Elastisitas Retribusi Pasar terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

Tahun Anggaran	Elastisitas = $\frac{\% \text{ Pertumbuhan retribusi pasar}}{\% \text{ Pertumbuhan jml penduduk}}$	% Pertambahan (Xi)	Log Xi
1993/1994	12,4770 : 0,9630 = 12,9563	112,9563	2,0529
1994/1995	13,5370 : 0,9678 = 13,9873	113,9873	2,0568
1995/1996	17,0234 : 0,9728 = 17,4993	117,4993	2,0700
1996/1997	7,7783 : 0,9727 = 7,9966	107,9966	2,0334
	Jumlah		8,2131

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Desember 1998

Untuk menghitung rata-rata elastisitas retribusi pasar terhadap jumlah penduduk selama tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998, digunakan rata-rata ukur sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \log G_m &= \frac{\sum \log X_i}{n} = \frac{8,2131}{4} \\ &= 2,0532 \\ G_m &= \text{Log } 2,0532 \\ &= 113,0511 \text{ atau } 13,05\% \end{aligned}$$

Lampiran 4 : Perhitungan Elastisitas Retribusi Pasar terhadap Inflasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

Tahun Anggaran	Elastisitas = $\frac{\% \text{ Pertumbuhan retribusi pasar}}{\% \text{ Pertumbuhan inflasi}}$	% Pertambahan (Xi)	Log Xi
1993/1994	12,4770 : 9,53 = 1,3092	101,3092	2,0056
1994/1995	13,5370 : 8,17 = 1,6569	101,6569	2,0071
1995/1996	17,0234 : 5,36 = 3,1760	103,1760	2,0135
1996/1997	7,7783 : 9,89 = 0,7864	100,7864	2,0034
Jumlah			8,0296

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Desember 1998

Untuk menghitung rata-rata elastisitas retribusi pasar terhadap jumlah penduduk selama tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998, digunakan rata-rata ukur sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Log } G_m &= \frac{\sum \log X_i}{n} = \frac{8,0296}{4} \\ &= 2,0074 \\ G_m &= \text{Log } 2,0074 \\ &= 101,7185 \text{ atau } 1,72 \% \end{aligned}$$

Lampiran 5 : Perhitungan Efektifitas Penerimaan Retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

Tahun Anggaran	Efektifitas = $\frac{\text{Realisasi pener. retribusi pasar}}{\text{Target Pener. Retribusi pasar}}$	% Pertambahan (Xi)	Log Xi
1993/1994	$819.993.220 : 767.500.000 = 1,0711$	101,0711	2,0046
1994/1995	$922.304.490 : 840.000.000 = 1,0979$	101,0979	2,0047
1995/1996	$1.047.157.040 : 980.000.000 = 1,0685$	101,0685	2,0046
1996/1997	$1.225.419.443 : 1.125.000.000 = 1,0892$	101,0892	2,0047
1997/1998	$1.320.798.605 : 1.240.000.000 = 1,0651$	101,0651	2,0045
Jumlah			10,0231

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Desember 1998

Untuk menghitung rata-rata efektifitas retribusi pasar selama tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998, digunakan rata-rata ukur sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Log Gm} &= \frac{\sum \log Xi}{n} = \frac{10,0231}{5} \\ &= 2,00462 \\ \text{Gm} &= \text{Log } 2,00462 \\ &= 101,0694 \text{ atau } 1,069\% \end{aligned}$$

Lampiran 6 : Perhitungan Efisiensi Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

Tahun Anggaran	Efisiensi = $\frac{\text{Biaya pengumpulan ret. pasar}}{\text{Realisasi penerimaan ret. pasar}}$	% Pertambahan (Xi)	Log Xi
1993/1994	$37.959.000 : 819.993.220 = 0,0462$	100,0462	2,00020
1994/1995	$79.381.000 : 922.304.490 = 0,0860$	100,0860	2,00037
1995/1996	$117.824.000 : 1.047.157.040 = 0,1125$	100,1125	2,00048
1996/1997	$147.983.000 : 1.225.419.443 = 0,1217$	100,1217	2,00052
1997/1998	$188.394.000 : 1.320.798.605 = 0,1426$	100,1426	2,00061
Jumlah			10,00218

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Desember 1998

Untuk menghitung rata-rata efektifitas retribusi pasar selama tahun anggaran 1993/1994 - 1997/1998, digunakan rata-rata ukur sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Log Gm} &= \frac{\sum \log X_i}{n} = \frac{10,00218}{5} \\ &= 2,000436 \\ \text{Gm} &= \text{Log } 2,000436 \\ &= 100,1004 \text{ atau } 0,100\% \end{aligned}$$

Lampiran 7 : Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

No.	Jenis Retribusi	Tahun Anggaran						
		1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998		
1.	Daerah Uang leges	62.806.300	69.812.625	65.804.650	99.409.340	110.962.574,5		
2.	Uang disamping	285.000.000	290.200.000	301.686.672	350.000.000	384.999.996		
3.	Uang pemeriksaan hewan	103.681.800	101.703.000	101.482.200	109.176.000	112.314.250		
4.	Uang sewa tanah atau bangunan	13.564.945	12.318.025	15.970.020	29.347.010	20.707.340		
5.	Uang sempadan atau tepi	205.024.492,25	267.754.491	294.774.013	290.908.050,5	229.894.387,8		
6.	Uang penguburan	426.000	405.000	467.500	502.500	351.500		
7.	STNK tak bermotor	26.937.000	29.333.000	49.285.500	45.998.000	26.677.500		
8.	Stasiun bus dan taxi	403.550.490,86	413.392.000	504.720.750	550.354.150	591.551.050		
9.	RSU dan balai pengobatan	1.053.470.094	1.279.005.001	990.921.154,9	1.235.594.868	1.741.075.770		
10.	Tempat rekreasi	71.975.000	72.649.700	88.452.350	97.426.300	112.469.700		
11.	Pasar	815.993.220	922.304.450	1.047.157.040	1.225.419.443	1.320.793.605		
12.	Pesangrahan	60.000.000	66.150.000	100.000.000	115.000.000	130.000.000		
13.	Parkir Kendaraan	410.230.160	415.998.140	575.024.980	398.405.120	532.381.100		
14.	Dipa	13.547.500	14.010.000	21.163.000	29.170.000	29.550.500		
15.	Kartu anak	25.269.900	53.100.900	57.598.250	53.421.600	53.223.300		
16.	Kebersihan	697.289.833,83	859.847.000	957.345.240	1.177.107.080	1.162.449.267		
17.	Pendaftaran KTP	-	-	300.297.049,6	1.841.000	642.400		
18.	Ambulans dan mobil jinjing	6.660.250	7.129.000	6.371.000	9.516.450	36.344.750		
19.	Sewa darat berat	14.045.000	10.370.000	20.221.000	18.625.000	10.023.500		
20.	Pemadam api	3.781.000	4.000.000	4.004.000	3.163.500	3.076.500		
21.	Paron	201.720.000	215.972.500	267.263.500	256.310.700	270.220.100		
22.	ijin trayek	13.130.000	14.010.000	14.105.000	17.905.000	21.335.000		
23.	Ipair	-	-	-	10.167.300	66.321.914,08		
Jumlah		4.492.022.985,9	5.118.863.222	5.784.300.869,5	6.124.769.215,56	6.967.387.104,16		

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, November 1998

Lampiran 8 : Jumlah Pasar di Kabupaten daerah Tingkat II Jember Menurut Kalsifikasinya pada tahun 1997

- A. Pasar Khusus Atau Utama : Pasar Tanjung
- B. Pasar Kelas I :
1. Pasar Kalisat
 2. Pasar Rambipuji
 3. Pasar Balung
 4. Pasar Tanggul
 5. Pasar Ambulu
 6. Pasar Kencong
 7. Pasar Gebang
- C. Pasar Kelas II :
1. Pasar Bangsalsari
 2. Pasar Puger
 3. Pasar Manggisari
 4. Pasar Jenggawah
 5. Pasar Johar
 6. Pasar Sukowono
 7. Pasar Mangli
 8. Pasar Umbulsari
- D. Pasar kelas III :
1. Pasar Tegalboto
 2. Pasar Mayang
 3. Pasar Gladakmerah
 4. Pasar Kreyongan
 5. Pasar Menampu
 6. Pasar Sempolan
 7. Pasar Petung
 8. Pasar Patrang
 9. Pasar Sukorejo
 10. Pasar Sukosari
- E. Pasar Hewan :
1. Pasar Hewan Sabtuan
 2. Pasar Hewan Kalisat
 3. Pasar Hewan Sukowono
 4. Pasar Hewan Mayang
 5. Pasar Hewan Rambipuji
 6. Pasar Hewan Bangsalsari
 7. Pasar Hewan Tanggul
 8. Pasar Hewan Kencong
 9. Pasar Hewan Ambulu
 10. Pasar Hewan Jenggawah
 11. Pasar Hewan Gumukmas

Lampiran 9 : Tarif Retribusi Pasar yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

Klasifikasi dan Golongan	Retribusi Pasar Sehari / M ²				
	LTU 1 (Rp)	LTU 2 (Rp)	LTU 3 (Rp)	LTU 4 (Rp)	LTU 5 (Rp)
KELAS UTAMA					
- golongan A	110.00	80.00	55.00	45.00	30.00
- golongan B	80.00	60.00	50.00	45.00	30.00
- golongan C	65.00	55.00	45.00	40.00	30.00
- golongan D	55.00	50.00	40.00	35.00	30.00
KELAS I					
- golongan A	85.00	60.00	45.00	40.00	30.00
- golongan B	70.00	55.00	45.00	35.00	30.00
- golongan C	55.00	45.00	40.00	35.00	30.00
- golongan D	50.00	45.00	40.00	35.00	30.00
KELAS II					
- golongan A	50.00	45.00	35.00	30.00	25.00
- golongan B	45.00	40.00	35.00	30.00	25.00
- golongan C	35.00	35.00	30.00	25.00	20.00
- golongan D	30.00	30.00	25.00	20.00	15.00
KELAS III					
- golongan A	45.00	35.00	30.00	25.00	20.00
- golongan B	35.00	30.00	25.00	20.00	20.00
- golongan C	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00
- golongan D	25.00	25.00	20.00	20.00	15.00

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, April 1998

Lampiran 10 : Pertumbuhan Jumlah Pasar dan Pemakai Jasa di Kabupaten
Daerah Tingkat II Jember Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998

Tahun A n g g a r a n	Jumlah Pasar		Jumlah Pemakai Jasa	
	Pasar Desa	Pasar PEMDA	Pasar Desa	Pasar PEMDA
1993/1994	51	25	3492	22546
1994/1995	51	25	3532	22887
1995/1996	51	25	3526	22833
1996/1997	55	26	3699	23766
1997/1998	55	26	3716	23975
Pertumbuhan	1,5	1,3	1,2	1,4

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, April 1998

